

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan)**

Cesylya Patasik¹, Junaidi Junaidi², Imran Ukkas³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah

Palopo, Palopo, Indonesia Email

korespondensi :

Chesylya180@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal, penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling*, analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan IBM SPSS 20. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder diperoleh melalui teknik data yang sudah ada, hasil penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pengalokasian Belanja Modal.

ABSTRACT

This study uses a quantitative type of research, the aim is to determine the effect of general allocation funds and special allocation funds on the allocation of capital expenditures, this study uses purposive sampling technique, data analysis uses multiple linear regression with IBM SPSS 20. The type of data in this study is data Secondary data obtained through existing data techniques, the results of this study, namely the General Allocation Fund (DAU) did not have a positive and significant effect on the allocation of capital expenditures. while the Special Allocation Fund (DAK) has no significant effect on the allocation of capital expenditures.

Keywords : General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure allocation.

PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur baik berupa bandara, pelabuhan, jalan raya dan lainnya. Pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat untuk menunjang kemajuan dan percepatan perputaran ekonomi masyarakat dan infrastruktur ini dapat menjadi aset buat Negara. Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk membahkan aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fisik fasilitas publik.

Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, yang sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pemendagri Nomor 13/2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat 2 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang dikaitkan dengan pengadaan /pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. kemudian pada pasal 53 ayat 4 permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkn bahwa Kepala daerah menetapkan batal minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin.

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat ditempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan lain-lain. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan servis kepada masyarakat seperti pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Namun demikian di Jawa Tengah masih belum meratanya jasa yang diberikan oleh kota atau kabupaten dalam memberikan servis yang berupa fasilitas umum, dimana masih kita temukan daerah yang minim dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD) (Nurul Hidayah, 2014).

Sianturi dan Putri (2018) bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam suatu kegiatan Pemerintah. Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemerintahan aset tetap yang

dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak memiliki uang yang dia miliki sendiri, karna seluruhnya adalah milik publik. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak dipergunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan suatu kemandirian daerah dalam pelayanan bidang sektor publik untuk menciptakan kenyamanan masyarakat. Untuk bisa kita mewujudkannya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang besar untuk dapat meningkatkan dalam layanan publik agar meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah (David dan Priyo, 2017). Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian suatu aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan suatu dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah mengalokasikan suatu belanja daerah untuk bisa melaksanakan rencana pembangunan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Untuk bisa diwujudkan kelancaran kegiatan pemerintahan, pemerintah daerah perlu mengubah komposisi pada belanjanya (Darwanto dan Yulia, 2017).

Menurut Syukri dan Hinaya (2019) bahwa Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karna semakin tinggi suatu belanja modal semakin tinggi juga produk aktivitas suatu perekonomian. Oleh sebab itu adanya suatu otonomi daerah sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karna memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan strategi yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya.

Menurut Dina Sandi dan Putu Kepramareni (2019) bahwa Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Rakyat tidak dapat dilepaskan dari suatu keberhasilan mengelola APBD secara efektif. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Menurut Dina Sandi dan Putu Kepramareni (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan suatu anggaran belanja harusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan.

Menurut Arry Eksandy dan Mohamad Zulman Hakim (2017) bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010). Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama membiayaan untuk pemeriharaan aset tetap yang sudah dihasil dari belanja modal tersebut. Belanja modal harus diperhatikan kemanfaatan dan kemampuan pemerintah daerah dalam suatu pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk bisa mengembangkan kompetensi

daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu ditingkatkan anggaran belanja modal, sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Menurut Heriston Sianturi dan Putri (2018), pendapatan Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil Uji Regresi, maka diketahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk Y sebesar 0,887, hal ini berarti 88,7% variabel Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya 11,3% (100% - 88,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model..

Menurut Muhammad Syukri (2019) yang telah melakukan penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X_2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X_1), dana alokasi umum (X_3) dan dana alokasi khusus (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y). Adapun saran yang diperlukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yaitu adanya penambahan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran belanja modal seperti dana perimbangan dan investasi.

Menurut Setiyawati (2014) melakukan penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pemerintahan Daerah Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua hipotesis adalah dampak yang signifikan, dan satu tidak berdampak signifikan Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung. Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintahan Lokal.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Pemerintah Kota Palopo".

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonom daerah. Dasar hukum dari dana alokasi umum adalah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Wandira (2013) menyatakan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan berdasarkan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah menjelaskan bahwa dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan dapat membangun perekonomian nasional (Rackmawati, 2016).

Pengalokasian Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Arry Eksandy dan Mohamad Zulman Hakim, 2017). Strategi Alokasi Belanja Daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari Dana Alokasi Umum maupun Pendapatan Asli Daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Sembiring, 2019).

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Wandira (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

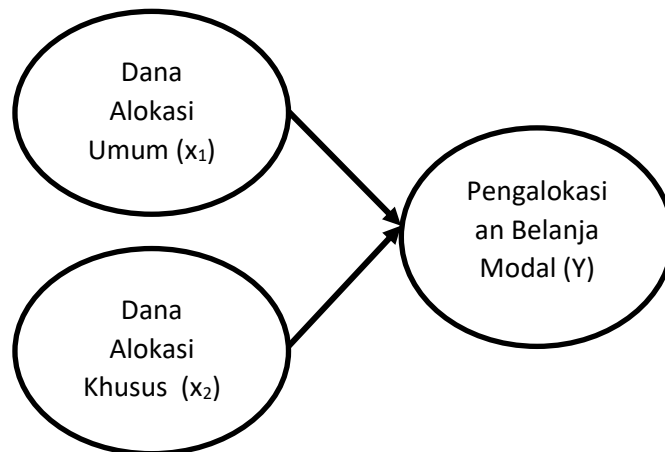
H₁: dana alokasi umum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi

tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Wandira, 2013).

H₂: Diduga bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.



Gambar 1 kerangka konseptual

METODE PENELITIAN

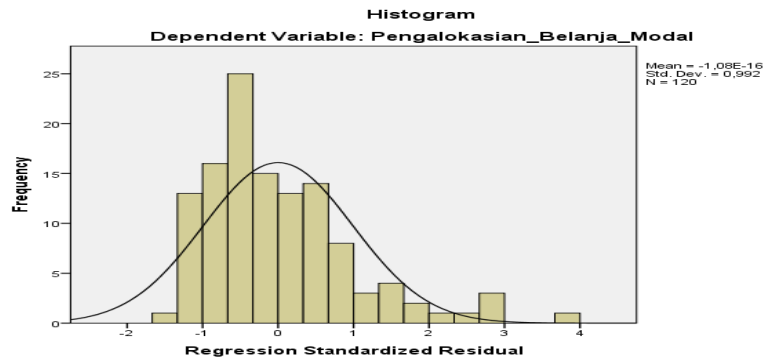
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara langsung dari melalui website kementerian keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan di ambil 5tahun mulai dari Tahun 2016-2020. Jumlah sampel yang digunakan 24 Kota/Kabupaten diseluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dengan metode *purposive sampling*. Adapun alat yang digunakan peneliti dalam membantu melakukan penelitian ini yaitu diantaranya dengan menggunakan aplikasi *IMB spss statistick 20*, yang digunakan dalam mengolah data kuantitatif yang bertujuan menemukan berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana dalam hal ini terdapat beberapa uji dalam menentukan apakah variabel layak untuk diuji yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis linier berganda, uji t (Uji Parsial), dan Koefisien Determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

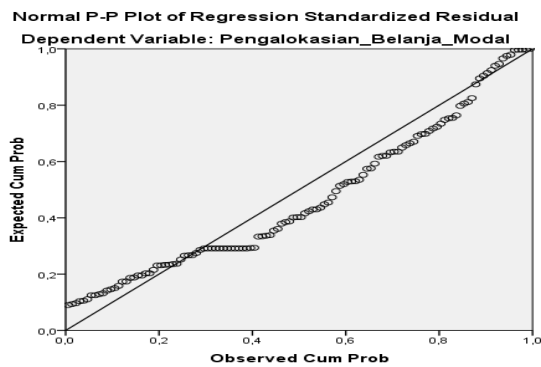
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian tentang normal atau tidaknya data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu : dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik untuk melihat distribusi normal dapat dilihat dengan grafik histogram dan grafik normal Probability-Plot. Sedangkan dengan uji statistik dapat dilakukan dengan uji non parametric Kolmogorov-Smirnov.



Gambar 2

Berdasarkan histogram (gambar 2), dapat dilihat bahwa kenaikan/penurunan data observasi mendekati garis melengkung dan tidak melenceng kekiri ataupun kekanan yang menggambarkan distribusi normal.



Gambar 3

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* pada gambar 3, dimana terlihat bahwa titik-titik menyebar keluar sedikit melewati garis diagonal serta penyebarannya keluar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara agak normal.

Tabel 1

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 120 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | 287,98110736 |
| | Absolute | ,116 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,116 |
| | Negative | -,088 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,276 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,077 |

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* (K-S) pada tabel 1 menunjukkan nilai 1,276 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,077. Karena hasil *kolmogorov-smirnov* menunjukkan signifikansi di atas 0,05 (sebesar 0,077) maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji ini memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik distribusi dimana keduanya menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antarvariabel independen. Jika tidak terjadi korelasi antarvariabel independen maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik. Untuk mengetahui adanya multikolonieritas, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut-off yang biasa dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Tabel 2

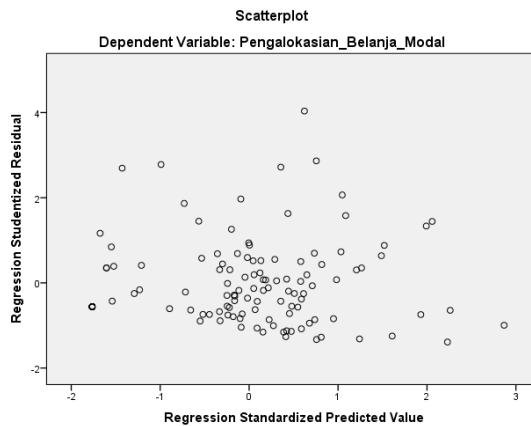
| Coefficients ^a | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|-------------------------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 159,685 | 57,083 | | 2,797 | ,006 | |
| | Dana_Alokasi_Khusus | ,160 | ,101 | ,200 | 1,582 | ,116 | ,460 |
| | Dana_Alokasi_Umum | ,038 | ,023 | ,204 | 1,613 | ,109 | ,460 |

a. Dependent Variable: Pengalokasian_Belanja_Modal

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (tabel 2), dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* DAU sebesar 0,460 dan DAK sebesar 0,460 kedua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. Hasil yang sama dilihat dari nilai VIF kedua variabel independen yang menunjukkan angka dibawah 10 (DAU 2,172 dan DAK 2,172). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tebebas dari multikolonieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastistas.



Gambar 4

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang meyebar secara tidak beraturan secara ajak di atas maupun di bawa angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan DAU dan DAK terhadap pengalokasian Belanja Modal dengan melihat kekuatan hubungan antar Pengalokasian Belanja Modal dengan DAU dan DAK. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian:

Tabel 3

| Coefficients^a | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 159,685 | 57,083 | | 2,797 | ,006 |
| 1 Dana_Alokasi_Umum | ,038 | ,023 | ,204 | 1,613 | ,109 |
| Dana_Alokasi_Khusus | ,160 | ,101 | ,200 | 1,582 | ,116 |
| A) Dependent Variable: Pengalokasian_Belanja_Modal | | | | | |

Dari tabel 3 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y=159,685+0,038 X_1 +0,160 X_2+e_i$$

Penjelasannya:

- a) Konstanta sebesar 159,685 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel bebas atau indepeden yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dianggap konstan maka variabel terikat atau dependen yaitu pengalokasian belanja modal sebesar Rp 159.685.000.000
- b) Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,038 menyatakan bahwa setiap kenaikan dana alokasi umum akan meningkatkan pengalokasian belanja modal sebesar Rp 38.000.0000

- c) Koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 0,160 menyatakan bahwa setiap kenaikan dana alokasi khusus akan meningkatkan pengalokasian belanja modal sebesar Rp 160.000.000

Uji Signifikansi Parameter Individual Regresi Secara Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu persatu atau secara parsial. Sehingga hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 4

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| | (Constant) | 159,685 | 57,083 | | 2,797 | ,006 |
| 1 | Dana_Alokasi_Umum | ,038 | ,023 | ,204 | 1,613 | ,109 |
| 2 | Dana_Alokasi_Khusus | ,160 | ,101 | ,200 | 1,582 | ,116 |

a. Dependent Variable: Pengalokasian_Belanja_Modal

Dari tabel 4 di atas dapat dijelaskan di bawah:

- Hasil uji t untuk H_1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 1,613 dengan signifikansi sebesar 0,109. Nilai signifikan untuk variabel DAU menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $1,613 < t\text{-tabel } 1,658$ yang artinya bahwa H_1 ditolak sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
- Hasil uji t untuk H_1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 1,582 dengan signifikansi sebesar 0,116. Nilai signifikan untuk variabel DAK menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $1,582 < t\text{-tabel } 1,658$ yang artinya bahwa H_1 ditolak sehingga DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 5 berikut ini:

Tabel 5

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,376 ^a | ,141 | ,127 | 290,432 |

a. Predictors: (Constant), Dana_Alokasi_Umum, Dana_Alokasi_Khusus
 b. Dependent Variable: Pengalokasian_Belanja_Modal

Berdasarkan model summary di atas, nilai R adalah 0,376 menunjukkan bahwa korelasi atau kekuatan asosiasi (hubungan) linier antar variabel merupakan korelasi yang kuat

antara DAU dan DAK terhadap Pengalokasian belanja modal dan dilihat koefisien determinasinya (*R Square*) sebesar 0,141. Hal ini berarti 14,1% variabel pengalokasian belanja modal dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu DAU dan DAK, sedangkan sisanya ($100\% - 14,1\% = 85,9$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum di uji secara parsial (*t*) terhadap pengalokasian belanja modal menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,109 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan data tersebut, bahwa variabel dana alokasi umum dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di peroleh nilai b_1 sebesar 0,038 hal ini berarti dana alokasi umum tidak mempengaruhi pengalokasian belanja modal sebesar 0,038 atau tidak berpengaruh artinya dana alokasi umum meningkat sebesar 1, maka tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal sebesar 0,038. Dengan demikian, penelitian ini di tolak yang artinya variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi khusus di uji secara parsial terhadap pengalokasian belanja modal menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,116 lebih besar dari 0,05 berdasarkan data tersebut, bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap variabel pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai b_2 sebesar 0,160 hal ini berarti dana alokasi khusus tidak mempengaruhi pengalokasian belanja modal sebesar 0,160 atau tidak berpengaruh dana alokasi umum meningkat 1, maka tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal sebesar 0,160. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini di tolak yang artinya variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum memiliki tidak pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
2. Dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Disusun* 0(0): 108–17.
- Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, Ekawati. 2017. Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang* (2009): 85–94.
- Dina Sandi, Putu Kepramareni, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dina. *Jurusan Akuntansi Falkultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar* 53(9): 1689–99.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghozali,Imam.2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali,Imam.2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali,Imam.2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Riva Ubar. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Provisi Sumatra Utara. *Jurnal Akuntansi* 01(01): 1689–99.
- Hasnur, A. Firman. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurusan Akuntansi Falkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin* 53(9): 1689–99.
- Heriston Sianturi, dan Anastasya Astrid Eka Putri. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi* 1(3): 1–19.
- Jayanti dan Fitri Dwi. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurusan Akuntansi Universitas Ngudi Waluyo Ungaran* 8(3): 335–41.

- Karyadi dan Santika Adhi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta* (4): 1–22.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3347>.
- Marizka dan Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* 84: 487–92.
<http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Muhammad Syukri dan Hinaya. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurusan Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma* 2(2): 30.
- Nurul Hidayah dan Hari Setiyawati. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta* xviii(01): 45–58.
- Priyatno dan Duwi. 2009. *Spss Untuk Analisis Korelasi, Rgresi, Dan Multivariate*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rachmawati dan Mia. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Di Provinsi Papua Dan Papua Barat). *Akuntansi*: 1–11.
- Sembiring dan Erika Apulina. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Potensi Utama* 1(2): 1000000.
- Setiyawati, Nurul Hidayah, dan Hari. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta* xviii(01): 45–58.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.

Wandira dan Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012). *skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*

